

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah Kota Kupang**

*Factors That Influence the Reliability of Financial Reporting in the City of Kupang*

**Helda Marlin Ala**

[heldamarlin.ala@gmail.com](mailto:heldamarlin.ala@gmail.com)

Universitas Kristen Arta Wacana

**Abstract**

*This study aims to analyze the influence of factors that affect the reliability of financial reporting in the city of Kupang, the influence of human resources on the reliability of regional financial reporting, the influence of information technology on the reliability of regional financial reporting, the effect of internal control on the reliability of regional financial reporting, and the effect of the quality of human resources on the use of information technology and the control of regional financial interventions on the reliability of regional financial reporting. This study shows that human resource capacity has a significant influence on the reliability of local government financial reporting, the use of information technology does not affect the reliability of Kupang City government financial statements, internal control has a significant influence on the reliability of Kupang financial reporting in the regional government.*

*The results of this study explain the capacity of human resources, the use of information technology and the reliability of financial reporting together affect the reliability of regional financial reporting. From the results of the study it can be seen that the value of the statistical test  $F_{count}$  value is  $14.421 > F_{table}$  value is 2.87 with significant level  $0,000 < 0,05$ , then  $H_4$  is accepted. meaning if the independent variables together then the reliability of financial reporting in this study as the dependent variable will also increase.*

**Keyword:** *Human Resource Capacity, Utilization of Information Technology, Internal Control, and Financial Reporting Reliability.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan daerah Kota Kupang. Pengaruh sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi, dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada BPKD Kota Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*) dengan jumlah sampel sebanyak 38 orang. Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik Analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS. Penelitian ini menunjukkan kapasitas sumberdaya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan daerah pemerintahan Kota Kupang, pengendalian intern mempunyai pengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah pemerintah Kota Kupang. Hasil penelitian ini menjelaskan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan keterandalan pelaporan keuangan secara bersama-sama mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian dapat diketahui nilai uji statistik nilai F hitung adalah sebesar  $14.421 >$  nilai F tabel adalah sebesar 2,87 dengan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  maka  $H_4$  diterima, artinya jika variabel independen secara bersama-sama maka keterandalan pelaporan keuangan dalam penelitian ini sebagai variabel dependen juga akan ikut meningkat.

**Kata Kunci:** Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, dan Keterandalan Pelaporan Keuangan.

## **Pendahuluan**

Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mempublikasikan dan menyajikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. *Governmental Accounting Standards Board* (1999) dalam *Concepts Statement No.1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk menerima dan mengetahui penjelasan atas pengumpulan sumberdaya dan penggunaannya. Laporan keuangan pemerintahan di Indonesia merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji dan dibahas, karena semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Laporan keuangan pemerintahan faktanya, masih banyak disajikan atau dilaporkan dengan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintahan (Indriasari & Ertambang Nahartyo, 2008).

Peningkatan volume transaksi yang semakin kompleks dan besar di pemerintahan tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Laporan keuangan dalam sektor publik memegang peranan yang sangat penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin tingginya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik (Adriani, 2010). Untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada *stakeholder* harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pihak-pihak pengguna laporan keuangan pemerintah antara lain : masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah sendiri (Warsito et al, 2008).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan penyusunan laporan keuangan daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang kurang memadai, terbatasnya pegawai pemerintah yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. oleh karena itu untuk dapat melaksanakan tanggungjawab dan menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik keterandalan, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting (Karmila & Darlis, 2014). Dari fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatanwaktu. Padahal saat sekarang ini, pemerintah menginginkan agar laporan keuangan baik pusat dan daerah disajikan secara andal dan tepat waktu. Hal ini dipertegas lagi bahwa salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. untuk meyakinkan stakeholders maupun publik tentang keakuratan dan keandalan laporan keuangan yang dibuat pemerintah maka dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal. Pengendalian intern diharapkan mampu mencegah atau

mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta dapat memberikan perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman penyelewengan atau sabotase sistem (PP Nomor 60 Tahun 2008).

Sumber daya manusia merupakan elemen utama dibandingkan yang lain. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuannya (Martoyo, 2002). Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan daerah dirancang dengan berpedoman pada PP Nomor 30 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi. Hal lain yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah perlunya optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan Akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dapat diartikan sebagai kewajiban pihak pengamanan (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik masalah keagenan muncul ketika pemerintah (agen) cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya, dari mulai proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja pemerintah selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya dimata *legislative* dan rakyat. Terkait banyaknya topik yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu Dian Tri Anggraeni (2014), penelitian ini mereplikasi dari penelitian tersebut. Ada perbedaan dalam penelitian ini, diantaranya adalah penelitian ini menambahkan beberapa variabel independen lain seperti: kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah Kota Kupang. Yang menjadi persoalan dalam penelitian ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kupang adalah kapasitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Terbatasnya pegawai pemerintah yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga sehingga laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatanwaktuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang. Motivasi dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadikan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang menjadi andal.

### **Metode**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada BPKD Kota Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat serta pengaruh antara dua variabel atau lebih. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kupang. Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposiv sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah:

pegawai yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kupang, dengan jumlah sampel 38 orang. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan metode angket (kuisisioner). Angket adalah daftar pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern, sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah keterandalan pelaporan keuangan. Variabel-variabel tersebut diukur dengan menggunakan pengukuran ordinal yang memungkinkan peneliti untuk memberikan skor untuk setiap jawaban responden dengan jawaban pertanyaan berupa peringkat misalnya: sangat tidak setuju, setuju, netral, setuju dan sangat setuju dapat diberi simbol angka 1, 2, 3, 4 dan 5. Angka angka ini hanya merupakan simbol peringkat, tidak mengekspresikan jumlah. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda persamaan yang digunakan dalam analisis sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

- Y = Keterandalan Pelaporan Keuangan
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien Regresi
- X1 = Kapasitas Sumber Daya Manusia
- X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi
- X3 = Pengendalian Intern Akuntansi
- e = error

### Analisis

Untuk menguji pengaruh variabel dengan perhitungan regresi linier berganda antara kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan dengan dibantu program SPSS dalam proses perhitungannya. Dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Uji Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.299	.427		.700	.489
Sumber Daya Manusia	.224	.105	.267	2.136	.040
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.084	.102	.099	.826	.415
Pengendalian Intern	.600	.138	.559	4.340	.000

a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas maka prediksi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: (1).  $\beta_1 \text{ KP} = 0,299 + 0,224 \text{ SDM} + 0,084 \text{ TI} + 0,600 \text{ PI} + e$ . Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut diatas memberikan pengertian bahwa : (1).  $\beta_1$  nilai koefisien regresi kualitas sumber daya manusia bernilai positif, mempunyai arti apabila kualitas sumber daya manusia semakin meningkat, maka keterandalan pelaporan keuangan yang dihasilkan semakin meningkat (2).  $\beta_2$  nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi bernilai positif, mempunyai arti apabila pemanfaatan teknologi informasi semakin meningkat, maka keterandalan pelaporan

keuangan yang dihasilkan semakin meningkat (3).  $\beta_3$  nilai koefisien regresi pengendalian intern bernilai positif, mempunyai arti apabila pengendalian intern semakin meningkat, maka keterandalan pelaporan keuangan yang dihasilkan semakin meningkat.

**Tabel 2**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.748 <sup>a</sup>	.560	.521	.34080

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Interen, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia

Sumber: Data primer diolah

Hasil uji koefisien determinasi dan koefisien korelasi berganda menunjukkan nilai R sebesar 0,748. Hal ini berarti bahwa hubungan atau korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan adalah kuat karena  $> 0,5$ . Nilai *R Square* sebesar 0,560 atau 56,0%, ini menunjukkan bahwa variable keterandalan pelaporan keuangan yang dapat dijelaskan variable kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern adalah sebesar 56%, sedangkan sisanya 44% dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Kelayakan Model**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5.25	3	1.675	14.421	.000 <sup>b</sup>
Residual	3.949	34	.116		
Total	8.974	37			

a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia

Berdasarkan tabel 3 maka dapat disimpulkan bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  sebesar  $14.421 > 2,87$  dengan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  karena probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2) dan pengendalian intern (X3) terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dihasilkan baik dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji statistik digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara parsial atau individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian dengan tingkat signifikan Jika nilai signifikan  $< 0,05$  atau  $t_{hitung} > t_{table}$  maka terdapat pengaruh variable X terhadap variabel Y dan jika nilai signifikan  $> 0,05$  atau  $t_{hitung} < t_{table}$  maka tidak terjadi pengaruh variabel X terhadap variabel Y diterima dengan rumus  $t_{tabel} = t(\alpha/2; n - k - 1) = t(0,025 : 34) = 2,032$ . Berikut ini hasil uji t menggunakan SPSS 23 sebagai berikut.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.299	.427		.700	.489
Sumber Daya Manusia	.224	.105	.267	2.136	.040
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.084	.102	.099	.826	.415
Pengendalian Intern	.600	.138	.559	4.340	.000

a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4 dapat kita interpretasikan sebagai berikut (1). Kuliatas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar  $0,040 < 0,05$  dan nilai  $t_{tabel} < t_{hitung}$  dengan nilai  $2,032 < 2,136$  hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. (2). Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, hal ini terbukti dengan signifikan sebesar  $0,415 > 0,05$  dan  $t_{table} > t_{hitung}$  dengan nilai  $2,032 > 0,826$  hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak. (3). Pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dan  $t_{table} < t_{hitung}$  maka hipotesis ( $H_3$ ) diterima.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah

Kapasitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dari tabel 4 dapat dilihat besar t hitung untuk pengujian hipotesis ini adalah sebesar 2.136 Nilai t tabel adalah sebesar  $2,032 < 2,136$  dan dari kolom Sig. (signifikansi) diperoleh nilai  $0,05 > 0,040$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kapasitas sumberdaya manusia secara parsial berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dengan kata lain  $H_1$  diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur sebagai penyusun laporan keuangan maka tingkat keandalan informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan SKPD Kota Kupang Semakin tinggi. Kesimpulannya adalah semakin tinggi tingkat kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas pada sub bagian keuangan dari satu instansi pemerintah daerah, maka semakin baik pula instansi menghasilkan informasi keuangan yang andal. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Darwanis dan Mahyani (2009), Megayanti, Adiputra dan Sinarwati (2015), Primayana, Atmadja dan sari (2014) serta Husna (2013) yang memberikan bukti bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah ternyata menentukan kualitas laporan keuangan pada SKPD pemerintah daerah.

### 2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah

Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki t hitung  $< t$  tabel dengan nilai  $0,826 < 2,032$  atau dapat dilihat dari tingkat signifikan  $0,415 > 0,05$ . Hal ini berarti menolak  $H_1$ . sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan daerah pemerintahan Kota Kupang. Hal ini mungkin karena pemerintah Kota Kupang dalam memaksimalkan sistem komputer yang

terintegrasi, sehingga terpenuhi syarat dalam menciptakan keterandalan laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemerosesan transaksi dan data serta keakuratan dan tepat waktu, akan tetapi kurangnya pemeliharaan dan tingkat kemampuan pengoperasian teknologi informasi itu sendiri mengakibatkan fungsi dari teknologi informasi itu sendiri tidak menjadi maksimal, sehingga menghambat aktivitas pekerjaan, selain itu kecanggihan teknologi itu sendiri akan membantu mempercepat pekerjaan. Hasil penelitian berlawanan dengan penelitian Primayana, et al (2014), Andriani (2010), Mahaputra (2014). Tetapi sejalan dengan penelitian Mirnayanti (2013).

### **3. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah bernilai positif dan nilai signifikansi dengan nilai  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t$  tabel  $< t$  hitung dengan nilai  $2,032 < 4.340$ . Menandakan bahwa pengendalian intern mempunyai pengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, sehingga  $H_3$  yang menyatakan dugaan adanya pengaruh pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan Daerah. Kegiatan pengendalian internal ini tentunya menjamin semua pencatatan akuntansi keuangan pemerintah telah sesuai dengan prosedur serta peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga tujuan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah tercapai. Penelitian ini sejalan dengan Primayana, et al, (2014) Irshani Ashrawiyadi dan Ikhsan Budi Riharjo (2017) mengemukakan adanya hubungan positif dan signifikan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

### **4. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah**

Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan keterandalan pelaporan keuangan secara bersama-sama mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian dapat diketahui nilai uji statistik nilai  $F$  hitung adalah sebesar  $14.421 >$  nilai  $F$  tabel adalah sebesar  $2,87$  dengan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  maka  $H_4$  diterima. Artinya jika variabel independen secara bersama-sama maka keterandalan pelaporan keuangan dalam penelitian ini sebagai variabel dependen juga akan ikut meningkat. Senada dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Primayana dan Anantawikrama (2014) serta Febriady (2007) memperoleh hasil bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern belum tentu dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal. Sistem akuntansi pemerintahan daerah memiliki transaksi yang kompleks dan volume yang relative besar. Oleh karena itu, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern, akan sangat membantu dalam proses tahapan dalam mengelola data transaksi dan aktivitas keuangan sehingga dapat dimungkinkan laporan keuangan yang di hasilkan terbebas dari kesalahan material yang di sebabkan oleh *human error*.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di bahas, kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut :

Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah Daerah Kota Kupang. Dikatakan berpengaruh signifikan,

karena selain melihat latar belakang pendidikan yang sebagian besar lulusan S1, serta peningkatan pelaksanaan pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi atau pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Sehingga disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah Daerah Kota Kupang.

Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang. Seharusnya pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data serta keakuratan dan tepat waktu, akan tetapi kurangnya pemeliharaan dan tingkat kemampuan pengoperasian teknologi informasi itu sendiri mengakibatkan fungsi dari teknologi informasi itu sendiri tidak menjadi maksimal, sehingga menghambat aktivitas pekerjaan. Selain itu kecanggihan teknologi itu sendiri akan membantu mempercepat pekerjaan, tetapi kenyataannya teknologi di pemerintah kota kupang belum memadai, sehingga pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah Daerah Kota Kupang.

Pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kegiatan pengendalian internal ini tentunya menjamin semua pencatatan akuntansi atau keuangan pemerintah yang telah sesuai dengan prosedur serta peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga tujuan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah tercapai. Sehingga disimpulkan bahwa semakin baik pengendalian intern maka semakin andal juga pelaporan keuangan pemerintah daerah kota kupang.

Dari pengujian kelayakan model uji F diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah berpengaruh signifikan sehingga penelitian menemukan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern sesuai sebagai variabel penjelas dan berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dalam kualitas laporan keuangan pemerintah harus membutuhkan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengendalian internal agar bisa menghasilkan laporan keuangan yang handal, dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan bisa memuaskan dan dapat dipercaya terhadap laporan keuangan, sehingga pemerintah daerah Kota Kupang harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern, supaya tetap terjaga kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

### **Daftar Pustaka**

- Adriani, W. (2010). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol 5, No.1: pp. 69-80.
- Anggraeni, D. T., & Akhmad Riduwan. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Studi pada SKPD Kabupaten Bengkulu.
- Accounting Standards Board, (1999).
- Darwanis, & Desi D. Mahayani. (2009). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol 2 No 2, Hal 13.

- Irshani Ashrawiyadi & Ikhsan Budi Raharjo. (2017). Pengaruh Ekspetasi Kerja, Ekspetasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfilitasi Pemakai terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten di Pulau Madura). Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi. UGM .
- Indriasari, D., & Ertambang Nahartyo. (2008). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internakuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Daerah. Simposium nasional akuntansi XII Pontianak 23-25 Juli 2008. .
- Karmila, A. R., & Darlis, E. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Pada emerintah Provinsi Riau. Vol 9.1.
- Megayanti, Adiputra & Sinarwati. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , ISSN :2302-8556.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Martoyo, S. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedelapan. BPFE. Yogyakarta.
- Mirnayanti. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sulawesi Barat). Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanudin.
- PP Nomor 60 Tahun 2008. (n.d.). "Tentang Pengendalian Internal Pemerintah.
- PP Nomor 30,Tahun 2008." Tentang Peraturan BPKP"
- Primayana, & Kadek Hengki, A. N. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandaan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah(Studi Pada Pemerintahan Daerah kabupaten Buleleng). Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi , Vol 2 No:1. .
- Wansyah, H. D., & Bakar U. (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kegiatan Terhadap Pengendalian terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. Jurnal Akuntansi. Vol. 1 No. 1, Agustus, Hal 43-58.
- Warsito et al. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang).